

**STRATEGI PEMERINTAH ACEH DALAM MENJADIKAN ACEH  
SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DI WILAYAH BARAT  
INDONESIA**

**M. Haekal Dwi Putra, Zainal Abidin**

**(ha029c@gmail.com, zainalabidin@unsyiah.ac.id)**

**Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Unsyiah**

**ABSTRAK**

Poros Maritim merupakan salah satu kebijakan politik di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dimana mengedepankan pembangunan kelautan untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sebagai bentuk perwujudan pasal 1(6) Undang-Undang No.32 tahun 2014 mengenai kelautan. Namun strategi kebijakan pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia menemui banyak kendala yang menghambat tercapainya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kebijakan pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia dan untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara semiterstruktur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi kebijakan pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur perikanan, meningkatkan pelayanan di sektor pariwisata dan meningkatkan sumber daya manusia baik dibidang teknis maupun manajemen demi mencapai pemerataan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sesuai dengan bunyi pasal 1(6) Undang-Undang No.32 tahun 2014 tentang kelautan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan Undang-Undang No.32 tahun 2014 pasal

1(6) tentang kelautan atau strategi kebijakan pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia tidak berjalan dengan baik

**Kata Kunci:** Poros Maritim, Strategi Kebijakan, Pemerintah Aceh

#### ABSTRACT

*Maritime axis is one of the political policies in the era of Joko Widodo-Jusuf Kalla administration where the maritime development put forward to achieve economic equity and equity of welfare implemented by the Government of Aceh as a form of the realization of article 1 (6) Act No.32 of 2014 regarding maritime. However, the Aceh government's policy strategy in making Aceh a center of maritime axis in western Indonesia encountered many obstacles that hinder the achievement of economic equality and prosperity.*

*This study aimed not only at determining the strategies taken by the Aceh but also aimed at determining steps taken by Aceh government to succeed and realize the policy to make Aceh as a center of maritime in the western part of Indonesia.*

*The method used in this research using qualitative approach with descriptive research type. Informant selection technique used is purposive sampling technique. Data collection tools used in the form of semi-structured interviews and documentation studies.*

*The results of this study shows that the Aceh government's policy of making Aceh as the center of maritime axis in the western part of Indonesia is done by improving fishery infrastructure, improving services in tourism sector and increasing human resources both technical and management in order to achieve equitable distribution of economy and equity according to article 1 (6) of Law No.32 of 2014 on maritime affairs.*

*The conclusion of this research is the policy of Act No.32 year 2014 article 1 (6) about marine or policy strategy of Aceh government in making Aceh as center of maritime axis in western part of Indonesia not going well.*

**Keywords:** Maritime Axis, Policy Strategy, Aceh Government

---

---

STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENJADIKAN  
ACEH SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DI  
WILAYAH BARAT INDONESIA  
(M.Haekal Dwi Putra, Zainal Abidin)

## PENDAHULUAN

Sudah sering didengar bahwa Indonesia secara geografis terdiri dari beribu-ribu pulau, dilintasi garis khatulistiwa, terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman seluas lebih kurang 2,7 juta kilometer persegi atau sekitar 70 % dari wilayah NKRI, sedangkan daratan seluas kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi. Di samping itu, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) seluas 3,1 juta kilometer persegi menambah luas wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Semua ini membenarkan ciri-ciri yang menentukan Indonesia kedalam golongan negara maritim (Agus Suhartono, 2014:1).

Mencermati konstelasi geografis Indonesia yang sedemikian rupa, bangsa Indonesia menyadari bahwasanya laut merupakan media pemersatu sekaligus media penghubung antar pulau dan bahkan penghubung antar negara-negara didunia. Sehingga sudah sepatutnya seluruh aspek dan kehidupan dan penyelenggaraan negara perlu mempertimbangkan geostrategik, geopolitik, geososial dan budaya sebagai sebuah negara kepulauan. Pola pikir, sikap, dan polatindak bangsa harus didasari oleh kesadaran ruang maritim, sehingga sejatinya visi maritim menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa Indonesia.

Merestorasi kejayaan dunia maritim Indonesia menjadi fokus utama di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencoba mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk merubah pola pikir dan mencoba untuk merubah persepsi bangsa Indonesia sebagai negara agraris menjadi sebuah negara maritim. Untuk itu, terminologi "poros maritim" pun dikemukakan sebagai pondasi awal untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk mengembangkan dan mengeksplorasi potensi kemaritiman Indonesia.

Dalam perhelatan hari nusantara yang dilaksanakan di Banda Aceh, Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah menyatakan kesiapannya dalam

---

---

**STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENJADIKAN  
ACEH SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DI  
WILAYAH BARAT INDONESIA**  
(M.Haekal Dwi Putra, Zainal Abidin)

mendukung visi misi pemerintahan nasional terkait kebijakan poros maritim. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Provinsi Aceh diapit oleh selat malaka dan samudera Indonesia. Dengan luas pantai 2.666,7 kilometer persegi dan dengan luas laut 295.320 kilometer persegi sehingga memberikan keuntungan strategis secara geografis serta memiliki potensi kelautan yang sangat luar biasa besar untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Aceh.

Pada kenyataannya, kesiapan pemerintah Aceh dalam menjadikan provinsi Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia menemui hambatan yang sangat serius. Kurang profesionalnya pengelolaan sumber-sumber ekonomi kemaritiman seperti olahan hasil ikan, kerajinan khas daerah pesisir dan lain sebagainya sehingga berakibat kepada belum mampunya pemerintah dalam menyediakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Aceh. Sektor pariwisata juga tidak terlepas dari hambatan yang dapat mengganggu pemerintah aceh dalam merealisasikan kebijakan untuk menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia. Promosi pariwisata harus gencar dilakukan oleh instansi-instansi terkait demi memikat wisatawan lokal maupun internasional untuk berkunjung ke Aceh dan ini hanya akan terjadi apabila pemerintah mau mengalokasikan dana untuk melakukan promosi pariwisata. Faktor penunjang kenyamanan pariwisata seperti bus, rumah ibadah, toilet juga harus ditingkatkan agar sektor pariwisata dapat memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat aceh.

Sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten serta dapat bersaing dalam skala ekonomi global juga diperlukan dalam realisasi kebijakan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia, Sumber daya manusia yang terlatih dan dapat menguasai teknologi terkini sangat dibutuhkan sehingga mampu meningkatkan serta mengelola potensi-potensi ekonomi kemaritiman yang ada di provinsi Aceh sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Aceh. Pada akhirnya, pemerintah harus mampu menjamin keamanan di Aceh sehingga realisasi kebijakan Aceh sebagai poros maritim

---

---

**STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENJADIKAN  
ACEH SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DI  
WILAYAH BARAT INDONESIA  
(M.Haekal Dwi Putra, Zainal Abidin)**

diwilayah barat Indonesia dapat segera dilaksanakan dan mampu memberikan hasil yang signifikan bagi rakyat Aceh.

### TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan teoritis landasan teori, kerangka pemikiran atau kerangka konseptual.

#### 1. Kebijakan Publik

Menurut Makmur (2011:9) Pemikiran dasar dalam sebuah kebijakan selalu diawali dari pemikiran tentang penyusunannya, implementasi sampai kepada tahap evaluasi sebuah kebijakan. Semua aktifitas ini memerlukan berbagai pemikiran yang rasional dan objektif sehingga dapat menciptakan keadilan. Kebijakan publik (*public policy*) menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama. Sehingga untuk itu, dibutuhkan suatu rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah.

Thomas R Dye (Said Zainal Abidin, 2012:5), mendefinisikan kebijakan sebagai sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*is whatever government choose to do or not to do*). Definisi ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang memiliki wewenang yang dapat mencakup keseluruhan masyarakat kecuali pemerintah. Selain itu, definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Disamping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik dikarenakan memiliki dampak yang sama dengan pemilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. David Easton dalam Thoha (2005:62), mendefinisikan kebijakan publik sebagai alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat, tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan

---

---

STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENJADIKAN  
ACEH SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DI  
WILAYAH BARAT INDONESIA  
(M.Haekal Dwi Putra, Zainal Abidin)

semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah merupakan hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut. Menurut Anderson dalam Tachjan (2006:16), kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Dalam suatu negara, kebijakan publik tersebut tersusun dalam suatu strata yang menunjukkan tingkatan-tingkatan dari kebijakan yang paling tinggi yang sifatnya strategis sampai dengan kebijakan yang paling rendah yang sifatnya teknis operasional. Kebijakan yang lebih rendah merupakan penjabaran dari kebijakan yang lebih tinggi dan materinya tidak boleh bertentangan. Disamping itu, strata kebijakan publik tersebut memberikan gambaran dari suatu kebijakan yang masih bersifat umum dan abstrak sampai dengan tingkat kebijakan yang sudah dianggap konkrit, sehingga kebijakan tersebut dengan mudah dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Kebijakan merupakan suatu konsep yang menunjukkan suatu ungkapan yang sangat sederhana. Namun, apabila direnungkan secara mendalam kata kebijakan memiliki arti yang sangat luas jangkauannya, karena kebijakan berada dalam berbagai aspek individu, kelompok, sampai kepada aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan organisasi yang paling besar, seperti negara dan bangsa. Pemahaman secara mendalam mengenai konsep kebijakan dibutuhkan untuk menganalisis dan menentukan pola pemikiran maupun teknik pelaksanaan yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita suatu bangsa atau negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **1. Ekonomi Politik**

Ekonomi politik merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang memadukan dua cabang ilmu yaitu ekonomi dan politik yang karenanya memiliki dua tujuan yang berbeda. Tujuan pertama dari cabang ilmu ekonomi politik adalah untuk negara agar mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakatnya, sedangkan tujuan kedua dari cabang ilmu ekonomi politik adalah untuk sebuah negara atau pemerintah mampu menjalankan berbagai tugas serta fungsinya dengan baik. Adam Smith dalam Weingast dan Wittman (2006:3) mendefinisikan ekonomi politik sebagai sebuah cabang ilmu yang digunakan untuk

---

---

**STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENJADIKAN  
ACEH SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DI  
WILAYAH BARAT INDONESIA**  
(M.Haekal Dwi Putra, Zainal Abidin)

mempelajari tentang bagaimana sebuah negara mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan kesejahteraan didalam negara tersebut. J.S.Mill yang tertuang dalam buku karangan Deliarnov (2003:58) menjelaskan bahwa ekonomi politik adalah peran yang diambil oleh pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat membawa ke arah peningkatan efisiensi dan penciptaan iklim yang lebih baik sehingga tiap aktifitas ekonomi dapat diarahkan kearah yang lebih baik dan lebih pantas.

Ekonomi politik merupakan sebuah prinsip pengambilan keputusan dalam ekonomi yang bisa bertentangan dengan pengambilan keputusan dalam politik, sehingga dalam kondisi lingkungan politik tertentu, memungkinkan terjadinya interaksi antara keputusan ekonomi dan politik. Pertimbangan ini diambil mengingat kenyataan bahwa masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai konsumen dan produsen, akan tetapi juga sebagai warga negara dengan berbagai afiliasi politiknya. Melalui kekuatan politik yang dimilikinya, mereka tidak hanya dapat mengatur pasar, melainkan juga dapat mengambil alih secara langsung sumber daya yang ada dinegaranya. Sehingga mustahil untuk membuat sebuah prediksi ekonomi tanpa melakukan prediksi tentang respons politik yang mungkin terjadi ditengah-tengah masyarakat (Hudiyanto, 2004:4).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian ini lebih menonjolkan proses dan makna (perspektif subjektif). Pengumpulan data dilapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan juga menjadi faktor utama dalam penelitian ini.

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengeti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang berupa kata atau teks tersebut kemudian

---

**STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENJADIKAN  
ACEH SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DI  
WILAYAH BARAT INDONESIA**  
(M.Haekal Dwi Putra, Zainal Abidin)

dikumpulkan dan dianalisis. Hasil analisis dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema – tema. Dari hasil analisis tersebut kemudian peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalem.

Metode penelitian kualitatif menggunakan pertanyaan yang rinci. Pertanyaan biasa dimulai dengan yang umum kemudian lebih rinci dan mendetail. Pertanyaan bersifat umum dikarenakan peneliti memberikan ruang yang seluas – luasnya kepada responden untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya tanpa ada pembatasan. Informasi yang ‘kaya’ tersebut kemudian diperuncing oleh peneliti sehingga terpusat. Hal itu disebabkan oleh penekanan pada pentingnya informasi dari responden yang merupakan sumber data utamanya (Raco, 2010:7)

Kelebihan metode penelitian kualitatif ini adalah melihat individu secara utuh dan menggunakan latar ilmiah, dengan menggambarkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan seperti wawancara dan dokumentasi. Aktifitas awal dalam proses pengumpulan data adalah menentukan subjek/informan penelitiannya. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan informan penelitian. Sebab dari merekalah diharapkan informasi dapat terkumpul sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Menurut Idrus (2009:91) yang dimaksud dengan informan penelitian adalah orang / individu yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Untuk memperoleh data dan informasi, penentuan informan ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Yaitu dengan mengambil orang – orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri – ciri spesifik yang dimiliki sampel itu. Menurut Alamsyah Taher (2009:67) yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian, peneliti akan berusaha agar dalam sampel – sampel tersebut terdapat wakil – wakil dari segala lapisan populasi.

Data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Data dapat dikumpulkan dari latar data yang berbeda.

---

---

STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENJADIKAN  
ACEH SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DI  
WILAYAH BARAT INDONESIA  
(M.Haekal Dwi Putra, Zainal Abidin)



Berdasarkan jenisnya, data diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yang dimaksud dengan data primer adalah suatu objek atau dokumen original dari pelaku yang disebut sebagai *first-hand information*. Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer.

2. Data sekunder, yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. (Silalahi, 2009:289-291)

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Bikle adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain (Zuriah, 2006: 217). Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan tahapan tersebut, pertama sekali data dikumpulkan baik melalui wawancara maupun kepustakaan, lalu mereduksi data atau data diolah dengan memilah dan memilih, dan menyederhanakan data dengan merangkum yang penting-penting sesuai dengan fokus masalah penelitian. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu menyusun data-data yang telah direduksi dalam satuan-satuan dan tahap terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Strategi Kebijakan Aceh Sebagai Pusat Poros Maritim Di Wilayah Barat Indonesia

Kebijakan publik (*public policy*) menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama. Sehingga untuk itu, dibutuhkan suatu rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan poros maritim merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mencari sumber penghasilan yang baru dengan cara mengelola laut

---

STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENJADIKAN  
ACEH SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DI  
WILAYAH BARAT INDONESIA  
(M.Haekal Dwi Putra, Zainal Abidin)

yang ditujukan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang terlibat langsung didalamnya. Dalam rangka mendukung suksesnya kebijakan tersebut, pemerintah provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam upaya melalui SKPA terkait untuk menjalankan kebijakan tersebut seperti membangun tempat pendinginan ikan (*cold storage*), pembangunan lanjutan breakwater, pengerukan kolam pelabuhan, penambahan panjang dermaga bongkar muat, rencana pembangunan jembatan dari Gampong Jawa ke Lampulo, rencana penyediaan berbagai teknologi dalam rangka memperkuat sektor industri dan jasa maritim dengan standar internasional. Selain mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dibidang perikanan laut, pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPRA juga mempercepat pembangunan dibidang perikanan darat dengan membangun cluster tambak melalui program revitalisasi pertambakan rakyat. Selain melakukan program bantuan seperti pemberian bibit ikan, pakan ikan dan lain sebagainya, kebijakan ini juga akan ditunjang dengan pemberian pelatihan kepada pelaku usaha perikanan budidaya untuk menciptakan pelaku usaha yang mandiri dan efektif untuk meningkatkan hasil produksi dan berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan budidaya.

Pemanfaatan sektor pariwisata dalam rangka mempercepat pelaksanaan strategi pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia juga terus dilakukan dengan melaksanakan berbagai acara kemaritiman baik dalam skala nasional maupun internasional seperti mengadakan *sabang marine festival*. Beberapa peningkatan untuk memastikan kenyamanan wisatawan lokal maupun internasional terus dilakukan dengan mengedepankan aspek aksesibilitas, aminitas serta atraksi pariwisata.

Pemerintah Aceh juga menaruh perhatian khusus kepada pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang berguna didalam pengembangan industri perikanan, memberikan bantuan pendidikan kepada para pelajar dan mahasiswa yang berprestasi, mendirikan balai-balai pelatihan kerja serta melakukan kerjasama dengan Kemenkominfo, Diskominfo, Universitas dan seluruh

---

---

STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENJADIKAN  
ACEH SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DI  
WILAYAH BARAT INDONESIA  
(M.Haekal Dwi Putra, Zainal Abidin)

*stakeholder* yang bergerak dibidang teknologi informasi untuk membantu melahirkan masyarakat yang berbasis IT guna menghasilkan sumber daya manusia yang kredibel dan kompeten didalam mengembangkan ekonomi kemaritiman.

### **Hambatan Pemerintah Aceh Dalam Merealisasikan Strategi Kebijakan Pemerintah Aceh Menjadikan Aceh Sebagai Pusat Poros Maritim Di Wilayah Barat Indonesia**

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh didalam merealisasikan strategi kebijakan poros maritim adalah kurangnya kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Padahal untuk merealisasikan kebijakan poros maritim dibutuhkan dana yang jumlahnya tidak sedikit sehingga apabila mengandalkan dana yang bersumber dari APBA semata maka akan sangat sulit bagi Pemerintah Aceh untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Walaupun secara anggaran APBD Aceh memiliki keunggulan diantara beberapa provinsi lain, hal tersebut dibagi kedalam beberapa program yang menjadi prioritas Provinsi Aceh saat ini yang mengakibatkan kurangnya kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah provinsi untuk merealisasikan kebijakan poros maritim yang diusung oleh Pemprov Aceh. Dalam menjalankan strategi kebijakan pastinya dibutuhkan anggaran yang mencukupi untuk memastikan keberlangsungan kebijakan tersebut. Didalam merealisasikan kebijakan poros maritim, pemerintah provinsi Aceh menghadapi hambatan dalam segi alokasi anggaran. Besarnya anggaran yang dibutuhkan oleh Pemprov tidak sebanding dengan kemampuan anggaran yang dapat dialokasikan oleh Pemprov melalui SKPA terkait. Kurangnya support pemerintah pusat dari segi alokasi anggaran dirasa dapat menjadi faktor penghambat bagi pembangunan ekonomi maritim sehingga menghambat pertumbuhan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat khususnya bagi masyarakat Aceh. Pariwisata adalah salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Pemerintah Provinsi Aceh. Sayangnya, potensi kawasan pariwisata bahari yang ada di Provinsi Aceh belum bisa dikembangkan secara maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran yang

---

---

**STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENJADIKAN  
ACEH SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DI  
WILAYAH BARAT INDONESIA  
(M.Haekal Dwi Putra, Zainal Abidin)**

dimiliki oleh pemerintah Aceh. Selain dari keterbatasan anggaran ketidaksamaan visi antara satu SKPA dengan SKPA lainnya juga berperan besar dalam terhambatnya pengembangan kawasan pariwisata lain yang ada di Provinsi Aceh sehingga berakibat kepada ketidakmampuan pemerintah. Pariwisata merupakan penyumbang PAD terbesar bagi Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, harus ada perhatian khusus didalam mengembangkan potensi kawasan pariwisata bahari yang lain yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Aceh untuk memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Bentuk pelaksanaan strategi kebijakan poros maritim yang diusung oleh pemerintah Aceh yaitu : Pertama, melakukan peningkatan infrastruktur pengelolaan perikanan, Kedua, melakukan promosi dan pengembangan destinasi pariwisata, Ketiga, Meningkatkan Sumber Daya Manusia dibidang pelaksana teknis dan manajemen
2. Hambatan yang dialami pemerintah Aceh didalam merealisasikan strategi kebijakan kawasan poros maritim yaitu : Pertama, terbatasnya kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Aceh, Kedua, terhambatnya pengembangan kawasan pariwisata bahari selain sabang, Ketiga, Kurangnya Informasi terkait kebijakan kawasan poros maritim.

### **Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Aceh terus melakukan peningkatan terhadap infrastruktur perikanan seperti membangun pabrik

---

---

**STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENJADIKAN  
ACEH SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DI  
WILAYAH BARAT INDONESIA**  
(M.Haekal Dwi Putra, Zainal Abidin)

pengolahan ikan dengan memanfaatkan kawasan PPS Lampulo serta melakukan pengembangan destinasi wisata bahari didaerah-daerah lain selain sabang seperti dikawasan Pulau Banyak, Pulo Aceh dsb. Dan juga terus memberikan bantuan pendidikan kepada pemuda-pemudi Aceh sehingga mereka dapat berkontribusi terhadap pembangunan Aceh dimasa depan.

2. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dari segi anggaran untuk membantu berjalannya kebijakan kawasan poros maritim sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Aceh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suhartono. 2014. *"Sarasehan Indonesia Poros Maritim Dunia" Kedaulatan Maritim Indonesia. Jurnal. Supply Chain Indonesia*
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Said Zainal Abidin. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika
- Miftah Thoha. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi)
- Barry R Weingast & Donald A Wittman. 2006. *The Oxford Handbook of Political Economy*. New York : Oxford University Press Inc.
- Deliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Hudiyanto. 2004. *Ekonomi Politik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Alamsyah Taher. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh. *Syiah Kuala University Press*
- Ulber Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Nurul Zuriah. 2006. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

---

**STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENJADIKAN  
ACEH SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DI  
WILAYAH BARAT INDONESIA  
(M.Haekal Dwi Putra, Zainal Abidin)**



---

---

**STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENJADIKAN  
ACEH SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DI  
WILAYAH BARAT INDONESIA  
(M.Haekal Dwi Putra, Zainal Abidin)**